

**HAK SUAMI TERHADAP HADHANAH SETELAH
PERCERAIAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI ADAT; MARGA HARAHAHAP
DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I)**



OLEH :

HARRY YUDHA
NIM. 10321022450

PROGRAM S1

**JURUSAN AKHWAL AL-SYAKHSYIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2011**

ABSTRAK

Penelitian ini berjudul **“Hak Suami Terhadap Hadhanah Setelah Perceraian Menurut Hukum Islam” (Studi Adat Marga Harahap Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.** Dalam penelitian ini mengangkat permasalahan tentang (1) Hak Suami Terhadap Hadhanah Setelah Perceraian Dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. (2) Analisis Hukum Islam tentang hak hadhanah oleh suami setelah perceraian dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Adapun tujuan penelitian ini yaitu, (1) Untuk mengetahui hak suami atas hadhanah setelah perceraian dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. (2) Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang hak hadhanah oleh suami setelah perceraian dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

Penelitian ini adalah penelitian pustaka (*library reseach*) tentang hak hadhanah dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Populasi dalam penelitian ini setiap suami dan isteri yang bercerai. Karena jumlahnya tidak diketahui secara pasti, maka penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, sehingga sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 orang terdiri dari 3 orang dari tokoh adat dan 12 orang lelaki dan perempuan yang bercerai dalam Marga Harahap.

Sementara sumber data dalam penelitian ini terdiri dari Data Primer, yaitu data yang diambil dari tokoh adat, lelaki dan wanita yang bercerai dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, dan Data Sekunder adalah data pendukung yang penulis peroleh dari berbagai pihak yaitu data base kantor Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, buku-buku di Perpustakaan dan sumber penting yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian. Data-data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tahapan-tahapan pengumpulan data, selanjutnya dianalisis dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian diuraikan, dibandingkan, dan dihubungkan satu dengan yang lainnya dengang sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

Setelah data-data tersebut dianalisis, dihasilkanlah bahwa suami memiliki hak mutlak dalam hadhanah setelah perceraian dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Sementara, isteri tidak memiliki hak sama sekali, dan ia akan dikenakan sanksi ketika ingin bertemu dengan anak-anak mereka tanpa memperoleh izin dari mantan suaminya.

Berdasarkan permasalahan di atas dan dianalisis dengan hukum Islam, maka hak suami terhadap hadhanah setelah perceraian dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru bertentangan dengan hukum Islam, karena bila anak belum baligh, maka hak hadhanah merupakan hak isteri, karena anak belum bisa memilih siapa yang akan mengasuh mereka. Selanjutnya dari sisi psikologis, seorang ibu lebih memahami anaknya, bila dibandingkan dengan seorang ayah. Di sisi lain, bila anak sudah baligh, maka hak hadhanah berdasarkan keputusan atau ketetapan siapa yang dipilih oleh anak, artinya siapa yang diputuskan untuk mengasuh mereka, apakah ayah atau ibu.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
ABSTRAK	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	5
C. Rumusan Masalah	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	5
E. Metode Penelitian	6
F. Sistematikan Penulisan	9
 BAB II PROFIL KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU	
A. Kondisi Geografis dan Demografis	10
B. Agama dan Pendidikan	14
C. Sosial dan Budaya	17
 BAB III HAK HADHANAH DALAM ISLAM	
A. Pengertian	20
B. Dasar Hukum	24
C. Hak Istri Terhadap Anak Setelah Bercerai dengan Suami	31
D. Yang Berhak Melakukan Hadhanah	36
E. Masa Hadhanah	40
F. Kewajibah Ayah Terhadap Anak Setelah Perceraian	40
 BAB IV HAK SUAMI TERHADAP HADHANAH SETELAH PERCERAIAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM (STUDI ADAT MARGA HARAHAH DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU	
A. Hak Suami Setelah Perceraian Pada Marga Harahap	41
B. Analisis Hukum Islam	47
 BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	53
B. Saran	54
 DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN – LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan salah satu Kecamatan di Kota Pekanbaru. Kecamatan ini pemekaran dari Kecamatan Rumbai pada tahun 2005. Pemekaran terjadi dikarenakan padat dan bertambahnya jumlah populasi penduduk dari sebelumnya.

Luas Kecamatan Rumbai Pesisir adalah 49.086 Ha, terdiri atas enam kelurahan, yaitu Kelurahan Meranti Pandak, Limbungan, Lembah Sari, T.T Okura, Limbungan Baru, dan Lembah Damai¹.

Daerah ini terdapat heterogen suku bangsa yaitu, suku Minangkabau, Jawa, Melayu, Batak, dan suku Tionghoa. Suku Batak yang ada di daerah ini terdiri dari beberapa marga. Adapun marga yang dominan adalah Harahap.

Sejarah Marga Harahap menurut Batara Sangti Simanjuntak dalam buku sejarah Batak, harahap itu adalah *cicit* (anak mangulahi) dari Si Raja Borbor. Dengan urutan dari Si Raja Borbor → Bala Sahunu → Datu Talai Babana → Harahap. Dengan demikian harahap itu generasi ketujuh dari Si Raja Batak.

Marga Harahap berawal dari sislilah yang menyatakan Si Aji Malim Harahap adalah leluhurnya. Ayahnya disebut Datu' Dalu, ayah Datu Dalu disebut Ompu Raja Sodungdangon (Nagasaribu). Si Aji Malim Harahap anak dari Datu' Dalu, berarti Si Aji Malim Harahap bersaudara, yaitu abang adek

¹ Monografi Kantor Kecamatan Rumbai Pesisir, tahun 2007.

dengan Saribu Raja III (Pasaribu) dan sama-sama generasi ketujuh dari Si Raja Batak. Akan tetapi, setelah salah seorang anak Ompu Sarudak pergi dari Hutarimbaru, lalu membuka kampung sendiri. Kampung itu diberi nama Hutasuhut. Marga Harahap yang di Hutasuhut itulah yang menggunakan marga Hutasuhut.

Ada yang mengatakan bahwa marga Hutasuhut tersebut yang mengaku pecahan dari Lubis. Mayoritas marga Harahap menganut agama Islam. Tradisi orang batak khususnya marga Harahap tidak pernah bertahan atau berdiam diri di kampung dan kebanyakan merantu ke luar².

Selanjutnya marga harahap yang tumbuh dan berkembang tadi tentunya membutuhkan aturan hidup yang bertujuan untuk mengatur hubungan antar semarga maupun dengan marga lain. Oleh karena itu dibentuklah susunan adat seperti perkara yang mengatur dalam urusan rumah tangga di antaranya hak janda terhadap anak.

Dalam aturan adat suku batak yang menggunakan garis keturunan bersifat *patrilineal* (mengambil garis keturunan dari pihak bapak) khususnya Marga Harahap, yang mana ketika terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka hak dan kewajiban *hadhanah* (hak mengasuh anak) yang belum dewasa maupun yang sudah dewasa dibebankan kepada seorang suami, namun tidak tertutup kemungkinan suami meminta pertolongan kepada istri yang telah diceraikan untuk memberi air susu ibu (ASI) kepada anak selama dibutuhkan³.

² Richat Sinaga, *Silsilah Marga-Marga Batak*, (Jakarta: Dian Utama, 2000), Cet. Ke-1, h. 76.

³ Hajaruddin Harahap, Hatobangon, *Wawancara* 13 Mei 2007..

Faktanya, bahwa perceraian yang terjadi di tengah masyarakat terdiri atas dua bentuk yaitu cerai hidup dan mati. Dalam ketentuan adat batak, apabila terjadi perceraian, baik cerai mati ataupun hidup, hak pengasuh atas anak mutlak menjadi hak suami. Di samping itu, ketika suami meninggal dunia setelah terjadi perceraian maka hak asuh tetap menjadi tanggung jawab pihak ahli waris dari pihak suami, meskipun salah satu dari ahli waris tersebut tidak berasal dari suku batak⁴.

Masyarakat Batak yang bermarga harahap yang berkembang di Rumbai Pesisir pada khususnya memiliki sistem kekeluargaan *patrilineal* dimana garis keturunan anak dari pihak suami, dan bentuk perkawinannya dengan cara *jujuran*⁵.

Perkawinan *jujuran* adalah suatu perkawinan yang didahului dengan pembayaran *tuhor* (mahar) dari suami kepada istri, sehingga dengan pemberian itu istri secara otomatis telah masuk dan mengikut suami. Ketika anak lahir, maka anak tersebut menjadi hak suami atau ahli warisnya. Karena dalam suku batak, pihak laki-laki berkuasa atas segalanya.

Dalam Islam masalah *hadhanah* bila terjadi perceraian, maka ibu lebih berhak terhadap anak. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فَدَّقَ بَيِّنَاتِ الْوَلَدَةِ وَوَلَدَهَا فَدَقَّ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيِّنَ أَحَبَّتَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. (رواه أبو داود)

⁴ Hajaruddin Harahap, *Ibid*

⁵ *Jujuran* adalah suatu perkawinan yang didahului dengan pembayaran *tuhor* (mahar) dari pihak suami kepada pihak istri, sehingga dengan pemberian itu istri tersebut masuk dan mengikut kepada kelompok hukum dari suami dan anak yang lahir menjadi milik suami.

Artinya: Rasulullah Saw bersabda: barangsiapa yang memisahkan seorang ibu dari anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dari orang yang dikasihinya di hari kemudian⁶. (H.R. Abu Daud)

Dari hadits di atas dijelaskan bahwa Allah dan Rasul Saw mewarnai bagi siapa saja yang melakukan tindakan sebagaimana yang disampaikan dalam hadits di atas, maka Allah akan membalasnya di akhirat kelak. Selanjutnya, secara psikologis hak mengasuh anak atas ibu, karena seorang ibu lebih mengerti dan memahami dengan kebutuhan anaknya jika dibandingkan dengan seorang ayah. Seorang ibu dapat memberikan kasih sayang yang bersifat prima dibandingkan seorang ayah⁷.

Dalam Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa hak pemeliharaan anak ketika terjadi perceraian dalam Pasal 105, berbunyi:

- a Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya.
- b Pemeliharaan anak yang sudah *mumayyiz* diserahkan kepada anak untuk memilih antara ayah atau ibunya.
- c Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayah⁸.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik dan telah melakukan penelitian kasus adat dalam marga harahap dengan judul **“HAK SUAMI TERHADAP HADHANAH SETELAH PERCERAIAN DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM” (STUDI ADAT: MARGA HARAHAH DI KECAMATAN RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU).**

⁶ Imam Abu Daud, *Sunan Abu Daud*, (tk: tp, tt), h. 151.

⁷ Sayuti Thalib, *Hubungan Hukum Adat Dengan Hukum Islam*, (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 23.

⁸ Departemen Agama R.I, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: tp, 1997), h. 50.

B. BATASAN MASALAH

Agar penelitian ini sesuai sasaran yang diinginkan dengan benar dan tepat, penulis membatasi pembahasan dalam penelitian ini seputar masalah hak suami terhadap hadhanah setelah perceraian dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

C. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Hak Suami Terhadap Hadhanah Setelah Perceraian Dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru?
2. Bagaimana Analisis Hukum Islam tentang hak hadhanah oleh suami setelah perceraian dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru?

D. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui hak suami atas hadhanah setelah perceraian dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum Islam tentang hak hadhanah oleh suami setelah perceraian dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

2. Kegunaan Penelitian

- a. Mengembangkan dan mengaplikasikan disiplin ilmu penulis dalam bentuk penelitian.

- b. Sebagai sumbangan khazanah perpustakaan Ilmu Pengetahuan Islam.
- c. Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SH.I) pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

E. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian.

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field Research*) yang mengambil lokasi wilayah di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

2. Subyek dan Objek Penelitian.

- a. Subyek penelitian ini adalah suami istri yang telah bercerai dan memiliki anak serta bermarga harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.
- b. Obyek penelitian ini hak asuh anak pada Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

3. Populasi dan Sampel.

Populasi dalam penelitian ini adalah tokoh adat, lelaki dan wanita yang sudah bercerai dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Karena populasinya tidak diketahui dengan pasti, maka dalam penelitian ini penulis menggunakan metode *purfisive sampling*, yang mana peneliti menetapkan sendiri jumlah sampel dalam penelitian. Oleh karena itu, sampel dalam penelitian ini berjumlah 15 orang, terdiri dari 3 orang tokoh adat dan 12 orang lelaki dan wanita yang bercerai dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari tokoh adat, lelaki dan wanita yang bercerai dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

b. Data Sekunder.

Data Sekunder adalah data pendukung yang penulis peroleh dari berbagai pihak yaitu data base kantor Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, buku-buku di Perpustakaan dan sumber penting yang berhubungan dengan pembahasan dalam penelitian.

5. Metode Pengumpulan Data.

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka diperlukan metode pengumpulan data, baik dalam bentuk primer maupun sekunder. Adapun metode-metode tersebut adalah sebagai berikut:

- a Observasi, yaitu melakukan pengamatan secara langsung tentang gejala atau fenomena yang terjadi di lapangan.
- b Angket, yaitu yaitu pengambilan data yang dilakukan dengan cara membuat daftar pertanyaan terlebih dahulu, kemudian diajukan kepada responde guna mempermudah *interview*.
- c Wawancara, yaitu suatu metode pengumpulan data melalui proses dialog dan tanya jawab yang dilakukan oleh penulis terhadap para Tokoh adat dan masyarakat Marga Harahap yang berdomisili di Kecamatan Rumbai Pesisir.

6. Metode Analisa Data

Adapun data yang telah terkumpul dianalisa melalui analisa data kualitatif, yaitu analisa dengan jalan mengklasifikasikan data-data berdasarkan kategori-kategori atas dasar persamaan jenis dari data-data tersebut, kemudian diuraikan, dibandingkan, dan dihubungkan satu dengan yang lainnya dengan sedemikian rupa sehingga diperoleh gambaran yang utuh tentang masalah yang akan diteliti.

7. Metode Penulisan

Dalam penulisan ini menggunakan tiga metode penulisan:

- a. Metode Deduktif, yaitu dengan mengumpulkan kaedah-kaedah yang bersifat umum yang untuk diuraikan dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode Induktif, yaitu dengan mengumpulkan dari pertanyaan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, kemudian diambil suatu kesimpulan yang bersifat umum.
- c. Metode Diskriptif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data dan mengemukakan permasalahan secara objektif lalu dianalisa secara kritis, sehingga dapat disusun sesuai dengan kebutuhan dalam penelitian.

F. SISTIMATIKA PEMBAHASAN

Adapun sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri dari lima bab, yaitu sebagai berikut:

BAB I : BAB PENDAHULUAN, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Pembahasan.

BAB II : BAB TINJAUAN UMUM TENTANG RUMBAI PESISIR KOTA PEKANBARU. Dalam bab ini terdiri dari Kondisi Geografis dan Demografis, Agama dan Pendidikan, dan Keadaan Sosial Budaya.

BAB III : BAB TINJAUAN UMUM TENTANG HAK HADHANAH DALAM ISLAM, terdiri dari Pengertian dan Dasar Hukum *Hadhonah*, Hak Isteri Terhadap Anak Setelah Terjadi Perceraian, Kewajiban Ayah Terhadap Anak Setelah Terjadi Perceraian.

BAB IV : BAB PEMBAHASAN, terdiri dari Hak Hadhanah Oleh Suami Setelah Perceraian Dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, dan Tinjauan Hukum Islam Tentang Hak Hadhanah Oleh Suami Setelah Perceraian Dalam Marga Harahap Di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru.

BAB V : BAB PENUTUP, terdiri dari Kesimpulan dan Saran.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KECAMATAN RUMBAI PESISIR

KOTA PEKANBARU

A. KONDISI GEOGRAFIS DAN DEMOGRAFIS

Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan salah satu Kecamatan di Kota Pekanbaru. Kecamatan ini merupakan pemekaran dari Kecamatan Rumbai pada tahun 2007. Karena populasi penduduk semakin bertambah. Secara keseluruhan luas Kecamatan Rumbai Pesisir adalah 49.086 Ha dan terdiri dari 6 (enam) Kelurahan, yaitu Kelurahan Meranti Pandak, Kelurahan Limbungan, Kelurahan Lembah Sari, Kelurahan T. T Okura, Kelurahan Limbungan Baru dan Kelurahan Lembah Damai. Jarak dari Kota Pekanbaru \pm 5 Km (jarak tempuh normal 10 menit dengan berkendara¹).

Wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir terdiri dari dataran rendah, perairan dan rawa. Hanya sedikit yang dataran tinggi. Daerah yang dataran rendah dan rawa pada umumnya aliran dari Sungai Siak seperti Kelurahan Merantik Pandak, Kelurahan Limbungan Baru, Kelurahan Lembah Sari, dan Kelurahan Lembah Damai. Sedangkan dataran tinggi berada pada wilayah Danau Buatan seperti Kelurahan Limbungan dan Kelurahan T. T Okura².

Ketinggian Tanah dari permukaan laut Kecamatan Rumbai Pesisir yaitu 38 m, dengan curahan hujan rendah. Biasanya hujan turun pada bulan Juni sampai Desember, dan tofografi (daratan rendah dan tinggi) berbanding 75 % (persen) : 25 % (persen) antara daratan tinggi dan rendah dengan suhu udara rata-rata antara 25-27° C³.

¹ Data Demografi dan Monografi Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2007.

² *Ibid*

³ *Ibid*

Secara demografis, Kecamatan Rumbai Pesisir termasuk jumlah penduduk yang menengah, jumlahnya 58. 870 jiwa terdiri atas 13.179 Kepala Keluarga (KK), 63 Rukun Warga (RW), 275 Rumah Tangga (RT).

Adapun penduduk yang berdomisili Kecamatan Rumbai Pesisir berdasarkan umur dapat dilihat dari tabel di bawah ini :

TABEL II.1
PENDUDUK MENURUT USIA

NO	USIA	JUMLAH PENDUDUK
1	0 - 2 bulan	400 Jiwa
2	13 bulan - 4 tahun	890 jiwa
3	5 – 6 tahun	700 jiwa
4	7 - 12 tahun	2.500 jiwa
5	13 - 15 tahun	11.500 jiwa
6	16 - 18 tahun	8.300 jiwa
7	19 - 25 tahun	12.000 jiwa
8	26 - 35 tahun	9.800 jiwa
9	36 - 45 tahun	10.600 jiwa
10	46 - 50 tahun	1800 jiwa
11	51 - 60 tahun	125 jiwa
12	61 - 75 tahun	240 jiwa
13	Diatas 76 tahun	15 jiwa
Jumlah		58.870 JIWA

Sumber Data: Monografi Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2007.

Dari tabel di atas, dapat dilihat bahwa penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir menurut usia adalah 0-2 bulan berjumlah 400 jiwa, 13 bulan – 4 tahun berjumlah 890 jiwa, 5 – 6 tahun berjumlah 700 jiwa, 7 – 12 tahun berjumlah 2.500 jiwa, 13 – 15 tahun berjumlah 11.500 jiwa, 16 – 18 tahun berjumlah 8.300 jiwa,

19 – 25 tahun berjumlah 12.000 jiwa, 26 – 35 tahun berjumlah 9.800 jiwa, 36 – 45 tahun berjumlah 10.600 jiwa, 46 – 50 tahun berjumlah 1.800 jiwa, 51 – 60 tahun berjumlah 125 jiwa, 61 – 75 tahun berjumlah 240 jiwa, > 76 tahun berjumlah 15 jiwa. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa penduduk berdasarkan usia yang terbanyak adalah usia dari 19 – 25 tahun berjumlah 12.000 jiwa.

TABEL II.2
PENDUDUK MENURUT JENIS KELAMIN

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH PENDUDUK
1	Laki-laki	29.812 orang
2	Perempun	29.058 orang
Jumlah		58.870 orang

Sumber Data: Monografi Kecamatan Rumbai Pesisir. tahun 2007.

Dari tabel di atas menjelaskan bahwa di Kecamatan Rumbai Pesisir berdasar penduduk menurut jenis kelamin bahwa jumlah laki-laki dan perempuan berimbang yaitu laki-laki berjumlah 29.812 orang dan perempuan 29.058 orang dengan jumlah penduduk sebesar 58.870 orang.

Kecamatan Rumbai Pesisir merupakan daerah perumahan yang cukup padat, sehingga menyebabkan pola kehidupan penduduk di daerah ini terfokus kepada keahlian dalam bidang kepegawaian dan mampu untuk membuat usaha, baik di bidang perkantoran maupun wiraswasta, sebahagian kecil masyarakat bermatapencaharian sebagai petani.

Karena itu, sektor pendidikan dan kemampuan untuk berwiraswasta menjadi andalan masyarakat di daerah ini. Di samping itu, di Rumbai Pesisir terdapat beberapa perusahaan yang bisa menampung karyawan dan masyarakat sekitar seperti Turba Jurong dan Chevron Indonesia⁴.

⁴ *Ibid.*

Namun, dewasa ini banyaknya pengurangan karyawan, sehingga mengakibatkan banyaknya penduduk yang berubah profesi sebagai pedagang. Sesuai dengan tabel mata pencaharian penduduk sebagai berikut:

TABEL II.3
PENDUDUK MENURUT MATA PENCAHARIAN

NO	MATA PENCAHARIAN	JUMLAH
1	Pegawai Negeri Sipil	7.360 orang
2	Petani	7.358 orang
3	Pedagang / jasa	14.717 orang
4	Pegawai swasta / Buruh	29.435 orang
Jumlah		58.870 orang

Sumber Data: Monografi Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2007.

Berdasarkan tabel di atas, jumlah penduduk menurut matapencaharian yaitu Pegawai Negeri Sipil (PNS) berjumlah 7.360 orang, Petani berjumlah 7.358 orang, Pedagang berjumlah 14.717 orang, buruh berjumlah 29.435 orang. Jadi, dari tabel di atas mayoritas penduduk bermatapencaharian sebagai buruh.

Pada umumnya, penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir bertempat tinggal di kawasan perumahan BTN, sebagian besar perumahan tersebut dibangun di atas rawa-rawa yang telah ditimbun tanah. Jarak antara rumah satu dengan lainnya sangat rapat bahkan menyatu antara satu dengan yang lain.

Akhir-akhir ini perkembangan pemukiman penduduk telah mengarah pada kawasan perbukitan yang dibangun Perumahan dan Villa, yakni di lokasi daerah Danau Buatan dan sekitar. Bentuk bangunan pada awalnya berbentuk bangunan sederhana.

B. AGAMA DAN PENDIDIKAN

Mayoritas penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir beragama Islam, meskipun masih dijumpai agama selain Islam seperti Kristen. Agama selain Kristen ditemukan karena penduduk yang berdomisili, latar belakangnya berasal dari pendatang, sebagaimana terlihat pada tabel di bawah ini:

TABEL II.4
PENDUDUK MENURUT AGAMA

NO	AGAMA	JUMLAH
1	Islam	54.564 orang
2	Kristen Katolik	1.851 orang
3	Kristen Protestan	2.455 orang
Jumlah		58.870 orang

Sumber Data : Monografi Kantor Camat Rumbai Pesisir tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas, masyarakat yang beragama Islam berjumlah 54.564 orang, Kristen Katholik berjumlah 1.851 orang, Kristen Protestan berjumlah 2.455 orang. Jadi, dari tabel di atas mayoritas penduduk beragama Islam dengan jumlah penduduk 58.870 orang.

Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir termasuk penganut agama yang taat, hal ini dapat dilihat bahwa hampir disetiap Kelurahan dan RT mempunyai masjid dan mushalla yang dijadikan tempat ibadah dan upacara keagamaan lainnya, termasuk tempat musyawarah dan pertemuan untuk membicarakan kemajuan agama Islam. Jumlah masjid dan mushalla di Kecamatan Rumbai Pesisir dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

TABEL II.5
SARANA IBADAH

NO	SARANA IBADAH	JUMLAH
1	Masjid	53 unit
2	Mushalla	57 unit
Jumlah		110 unit

Sumber Data: Monografi Kantor Kecamatan Rumbai Pesisir Tahun 2007

Berdasarkan tabel di atas, bahwa sarana ibadah di Kecamatan Rumbai Pesisir masjid berjumlah 53 buah, mushalla 57 unit. Pembangunan sarana ibadah ini pada umumnya swadaya masyarakat, dan sebagian kecil bantuan dari pemerintah seperti Departemen Agama, Walikota dan pihak Kecamatan.

Pendidikan memang peranan yang sangat penting bagi kemajuan suatu bangsa dan merupakan suatu cara untuk meningkatkan kecerdasan manusia. Untuk mempersiapkan sumberdaya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan aspek yang sangat penting untuk ditingkatkan, baik oleh pemerinth maupun masyarakat secara keseluruhan. Untuk menciptakan sumberdaya manusia yang handal tidak cukup hanya dengan pendidikan tanpa didukung dengan keinginan yang kuat dan minat serta bakat masyarakat terhadap pendidikan. Di bawah ini tabel tentang tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir:

TABEL II.6
PENDUDUK MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Perguruan Tinggi/ Akademi	9.775 orang
2	SMU / MA	13.713 orang
3	SMP / MTS	14.866 orang
4	SD / MI	44.165 orang
5	TK	1.040 orang
6	Tidak Sekolah	15.061 orang
Jumlah		58.870 orang

Sumber Data: Monografi Kantor kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2007.

Berdasarkan jumlah penduduk menurut tingkat pendidikan, bahwa Perguruan Tinggi/ Akademi berjumlah 9.775 orang, SMU/ SMA berjumlah 13.713 orang, SMP/ MTs berjumlah 14.866 orang, SD/ MI berjumlah 44.165 orang, TK berjumlah 1.040 orang, tidak Sekolah berjumlah 15.061 orang. Jadi, dari tabel di atas terlihat 15.061 orang yang masih tidak sekolah.

Pembangunan yang sedang dilaksanakan di Indonesia tidak akan terwujud bila sumber daya manusia tidak dipersiapkan dengan baik. Di sisi lain pendidikan merupakan cara yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang profesional.

Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik setiap orang akan mendapat secara langsung memperbaiki tingkat kehidupannya ke arah yang lebih baik. Sehingga kesejahteraan masyarakat semakin cepat dapat diwujudkan. Tabel berikut ini dapat dilihat dan diperoleh gambaran tentang jumlah sarana/ lembaga pendidikan di Kecamatan Rumbai Pesisir:

TABEL II.7
SARANA PENDIDIKAN

NO	SARANA PENDIDIKAN	JUMLAH
1	SMU / MAN	4 buah
2	SMP / MTS	7 buah
3	SD	9 buah
4	MDA	12 buah
5	TK	4 buah
Jumlah		36 buah

Sumber Data: Monografi Kantor Kecamatan Rumbai Pesisir tahun 2007.

Berdasarkan tabel di atas, dapat dilihat bahwa sarana pendidikan di Kecamatan Rumbai Pesisir adalah sebagai berikut, SMU/ MAN sebanyak 4 buah, SMP/ MTs sebanyak 7 buah, SD/ Ibtidaiyah sebanyak 9 buah, MDA sebanyak 12 buah dan Taman Kanak-Kanak (TK) sebanyak 4 buah.

C. SOSIAL DAN BUDAYA

Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir pada umumnya adalah masyarakat yang mengikuti garis keturunan dari pihak ayah (*patrilineal*), artinya budaya yang berlaku dalam masyarakat pada umumnya berdasarkan *patrilineal*. Namun, di sisi lain masih ditemukan masyarakat yang mengikuti garis keturunan dari pihak ibu (*matrilineal*).

Masyarakat Kecamatan Rumbai Pesisir tidak terlepas dari budaya-budaya yang di bawa dari luar daerah seperti Nasution, Lubis, Pulungan, namun masyarakat asli Rumbai Pesisir mempunyai kesamaan sistem kekeluargaan dan perikatan antar daerah, dan masyarakat yang berlainan sistem sangat menghargai budaya yang bersifat *heterogen* tersebut. Karena masyarakat menganggap bahwa itu adalah masalah budaya.

Adapun adat dan tradisi yang berlaku di daerah ini banyak dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan yang dianut, terutama Islam.

Dalam pergaulan sosial kehidupan sehari-hari, tradisi dipraktikkan sesuai dengan tata nilai dan norma yang berlaku. Dalam membentuk rumah tangga misalnya, orang harus mengikuti ajaran agama dan aturan adat sekaligus, yang satu dengan yang lain saling melengkapi.

Dewasa ini terutama di era kemajuan *sains* dan *teknologi*, ketika masyarakat telah ikut memanfaatkan produk-produk teknologi modern seperti teknologi komunikasi yang membawa dampak terhadap perubahan pandangan hidup sebagian masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari pola hidup masyarakat yang konsumtif .

Di samping itu, di sisi lain terjadinya pergeseran norma nilai dalam bidang etika dan moral, terutama dalam kehidupan sosial generasi muda. Jika pada dua dasawarsa yang lalu pergaulan antara generasi muda antara lawan jenis, akan tetapi dalam prakteknya generasi muda terlihat sangat menghargai tata nilai adat dan nilai agama.

Hanya saja dengan adanya perkembangan zaman dan kemajuan dalam teknologi sehingga pergeseran nilai tersebut dijumpai. Yang mana sebahagian generasi muda dalam pergaulannya yang selalu mengikuti aturan-aturan dan norma-norma agama serta adat istiadat dianggap kurang cocok dengan konsep masyarakat moderen.

Dari sini dapat diklasifikasikan bahwa ada dua kelompok masyarakat dalam menyikapi adat yang berkembang, yaitu:

1. Kelompok yang masih mendukung dan mengharapkan serta berusaha menjaga kelestarian adat istiadat yang telah diwariskan;
2. Kelompok yang beranggapan bahwa adat tidak perlu dipertahankan. Karena tidak sesuai dengan perkembangan zaman yang serba canggih sekarang.

BAB III

HADHANAH DALAM ISLAM

A. PENGERTIAN

Hadhanah berasal dari bahasa Arab. Dengan asal kata, *Hadhana* (حَدَّان), *Yahdunu* (يَحْضِن), *Hadnan* (حَدَّن), *Ihtadhanah* (اِحْتَضَنَ), *Hadinatun* (حَدَّيْنَةُ), *Hawadin* (حَوَاضِيْن) yang artinya mengasuh anak, memeluk anak ataupun pengasuh anak¹.

Ulama mengemukakan beberapa definisi tentang *Hadhanah* dari segi bahasa, yaitu:

1. H. Djaman Nur, *Hadhanah* yaitu rusuk atau meletakkan sesuatu di dekat tulang rusuk atau dipangkuan²;
2. M. Idris Marbawi, *Hadhanah* berasal dari kata *Hadhanah-Yahdinu-Hadhanah*, yang berarti memeluk³;
3. Imam Sayyid Sabiq mendefinisikan *Hadhanah* sebagai lambung. Seperti kata *Hadahah Athairu badhahu* yang artinya burung itu mengepit telur di bawah sayapnya⁴;
4. Zakiah Drajat mengatakan bahwa *Hadhanah* yaitu meletakkan sesuatu dekat tulang rusuk atau pangkuan karena ibu waktu menyusukan anaknya; meletakkan di pangkuannya, seakan-akan di waktu itu melindungi dan memelihara anaknya⁵;

¹ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989), h. 104.

² Djaman Nur, *Fikih Munakahat*, (Semarang: Bina Utama, 1993), h. 119.

³ M. Idris Marbawi, *Kamus Al-Marbawi*, (Semarang: Usaha Keluarga, tt), h. 138.

⁴ Sayyid Sabiq, *Fikih Al-Sunnah*, Alih Bahasa Moh Thalib, (Bandung: al-Ma'arif, 1980), h. 160.

⁵ Zakiah Drajat, *Ilmu Fiqih*, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995), h. 157.

5. Abdul Azis Dahlan mengatakan, *Hadhanah* yaitu disamping atau berada di bawah ketiak⁶.

Di dalam buku Muhammad Amin Summa diterangkan bahwa *hadhanah* (حضانة) jamaknya *ahdhan* () atau *hudhun* () terambil dari kata *hadhin* (حاضن) ialah anggota badan yang terletak di bawah ketiak hingga *al-kayh* (bagian badan sekitar pinggul antara pusat hingga pinggang). Kalau disebutkan *hidhn as-syay*. Maka yang dimaksud adalah dua sisi dari sesuatu.

Burung dikatakan *hadha al-tha'ir baydhahu* (الطير), manakala burung itu mengerami telornya karena dia mengumpulkan (mengempit) telornya itu di bawah himpitan sayapnya.

Demikian pula sebutan *hadhanah* diberikan kepada seorang perempuan (ibu) manakala mendekap (menggendong) anaknya di bawah ketiak, dada serta pinggulnya⁷.

Ulama juga memberikan pengertian *Hadahnah* dalam bentuk istilah yaitu:

1. Sayyid Sabiq dalam Fikih Sunnah mendefenisikan bahwa *hadanah* adalah melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil laki-laki ataupun perempuan atau yang sudah besar, tetapi belum tamyiz, tanpa perintah darinya, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya baik jasmani maupun rohani dan akalanya, agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya⁸.

⁶ Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ictiar Van Hoeve, 1997), h. 415.

⁷ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga di Dunia Islam*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004), h. 99.

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, (Bairut: Darul Fikri, tt), juz II, h. 288.

2. Menurut Abu Bakar Jabir al-Jaziri , *hadhanah* adalah mengasuh anak kecil dan membiayainya hingga usia dewasa⁹;
3. Ibnu Qayyim al-Bajuri mendefenisikan *hadhanah* adalah memelihara orang yang belum mampu mengurus dirinya sendiri dari suatu yang menyakitinya, karena belum dapat membedakan antara yang baik dan yang buruk¹⁰.

Salah satu tujuan pernikahan selain untuk menyalurkan kebutuhan biologis (seksual), bertujuan membentuk rumah tangga yang bahagia (*sakinah*). Rumah tangga sakinah adalah rumah tangga yang bahagia. Kehadiran seorang anak dalam keluarga mendukung terwujudnya rumah tangga yang bahagia. Karena seorang anak merupakan perhiasan bagi kedua orang tuanya.

Dari sini jelas, bahwa kedudukan seorang anak dalam rumah tangga sangat penting; dapat menunjang sebuah keluarga mewujudkan keluarga yang bahagia. Di dalam Islam pembahasan tersebut dikaji khusus, dikenal dengan istilah *hadhanah*.

Di samping itu, Para fuqaha juga mendefenisikan *hadhanah* dengan suatu ungkapan (titeratur) terhadap aktivitas yang dilakukan orang tua dalam mengasuh anak kecil baik pria maupun wanita. Bahkan terhadap seorang anak yang idiot (*ma'tuh*) yang tidak bisa membedakan mana yang baik dan mana

⁹ Abu Bakar Jabir Al-Jaziri, *Minhajul Muslimin*, (Bairut: Darul Fikri, tt), h. 465.

¹⁰ Ibnu Qayyim Al-Bajuri Al-Ghazi, *Terjemahan AlBajuri*, (Indonesia: Maktabah Dahlan, tt), h. 195.

yang buruk serta tidak bisa mengurus atau mengasuh dirinya sendiri. Kemudian orang tua yang mengurusnya demi menjaga kemaslahatan anak tersebut, memelihara dan menghindari anaknya dari hal-hal yang membahayakan yaitu dengan cara mendidiknya, baik fisik, kejiwaan (psikis) maupun akal¹¹.

Dalam istilah sehari-hari, kata *hadhanah* atau *al-hidhanah* lazim digunakan dengan maksud pengasuhan dan pekerjaan mengasuh anak. Adapun alasan mengapa *hadhanah* terkadang digunakan untuk pengertian *kafalah al-thifl* (tanggungan atau jaminan anak) dan *rawdha al-athfal* (taman kanak-kanak).

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), *hadhanah* diartikan dengan pemeliharaan anak. "Pemeliharaan anak atau *hadhanah* adalah kegiatan mengasuh, memelihara, dan mendidik anak hingga dewasa sehingga ia mampu berdiri sendiri atau mengurus urusannya sendiri". Termasuk dalam kewajiban untuk menyusui (*radha'ah*)¹². *Hadhanah* menurut istilah adalah pendidikan dan pemeliharaan anak sejak dari lahir sampai sanggup berdiri sendiri mengurus dirinya yang dilakukan oleh orang tua, kerabat atau ahli waris¹³.

Dari beberapa definisi yang telah dikemukakan di atas, maka *hadhanah* adalah kewajiban merawat, mendidik serta menjaga anak yang dibebankan kepada kedua orang tua hingga anak mampu mandiri. *Hadhanah* berbeda dengan pendidikan (*tarbiyah*). Dalam *hadhanah* mengandung

¹¹ *Ibid*, h. 99.

¹² Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta:tp, 1997), h. 100.

¹³ Satria Effendi, *Problematisasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Media), Th. 2004, Cet 1, h. 166.

pengertian pemeliharaan jasmani dan rohani; di samping pemeliharaan jasmani dan rohani juga terkandung pula kewajiban mendidik anak¹⁴. Jadi, pendidikan merupakan bagian dari *hadhanah*.

B. DASAR HUKUM

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ
وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ
مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan” (TQS. at-Tahrim [66]: 6)¹⁵.

Dalam ayat ini orang tua diperintahkan Allah SWT untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya untuk melaksanakan perintah dan menjauhi setiap larangan Allah SWT. Dan anak merupakan bagian dari anggota keluarga.

Dalam ayat ini juga dinyatakan bahwa orang tua khususnya bapak sebagai kepala keluarga (KK) yang berkewajiban untuk menjaga keluarganya dari ancaman api neraka dengan cara memberikan pengajaran dan pendidikan yang optimal, serta mengarahkannya dari siksaan tersebut.

¹⁴ Abd. Rahmat Ghazali, *Fqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2006), Cet. Ke-2, h. 176.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 448.

Dalam menafsirkan ayat ini, Hamka menjelaskan bahwa untuk menghindari diri dari siksaan api neraka tentunya tidak hanya semata-mata mengakui beriman saja sudah cukup, namun keimanan harus dipelihara dan dipupuk. Terutama sekali dengan dasar iman hendaklah setiap orang menjaga keselamatan dirinya dan keluarganya dari hal-hal yang dapat menjerumuskannya kedalam api neraka¹⁶.

Pemeliharaan anak pada dasarnya menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Secara khusus al Qur'an menganjurkan kepada ibu untuk mengasuh anak-anak mereka, sebagaimana firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya : “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf” (TQS. al-Baqarah [2]: 233)¹⁷.

Dari ayat di atas, sehingga dapat dipahami bahwa Allah SWT mensyari'atkan kepada para ibu untuk menyusukan anaknya selama dua tahun penuh. Hal ini disyari'atkan sebagai penyempurnaan terhadap susuannya.

Ketentuan Allah SWT juga berfirman:

¹⁶ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1981), Jilid XXVIII, h. 369.

¹⁷ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 57.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ
لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى
يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَتَمِرُوا
بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاسَرْتُمْ فَسَتَرْضِعْ لَهُنَّ أُخْرَى ۖ

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (TQS. Ath-Thalaq [65]: 6)¹⁸.

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa para istri yang diceraikan suami mereka, namun mereka dalam keadaan hamil, dalam hal ini Islam memerintahkan agar suami memberikan nafkah kepada istri. Jika istri tersebut menyusukan anak-anaknya, maka suami berkewajiban memberi upah susuan tersebut. Di sisi lain, ayat di atas merupakan konsekwensi logis bahwa seorang ayah juga memiliki kewajiban dan bertanggung jawab dalam memenuhi nafkah atas anak-anak mereka. Hal ini di karenakan ayah bagaikan nakhoda dalam sebuah kapal yang sedang belayar, dan nakhoda bertanggung jawab atas selamat atau tidaknya penumpang hingga sampai ke tujuan yang diinginkan. Peran seorang ayah dalam keluarga sangat menentukan dan dibutuhkan. Dan ayah adalah pemimpin dalam keluarganya. Allah SWT berfirman:

¹⁸ Ibid, h. 946.

وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ
وَالْعَقِيبَةُ لِلتَّقْوَى ﴿١٣٢﴾

Artinya: “Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, Kamilah yang memberi rezki kepadamu. Dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa” (TQS. Thaha [20]: 132)¹⁹.

Kemudian perintah yang senada ditemui dalam surat Luqman ayat 17 yang berbunyi:

يَبْنِيْ اَقِمِ الصَّلَاةَ وَاْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَاَنْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ
وَاَصْبِرْ عَلٰى مَا اَصَابَكَ اِنَّ ذٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْاُمُوْر ﴿١٧﴾

Artinya: “Hai anakku, dirikanlah shalat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah” (TQS. Lukman [31]: 17)²⁰.

Dari dua surat di atas, dapat dipahami bahwa kewajiban orang tua ialah mendidik anak-anaknya dalam beribadah kepada Allah SWT, dengan memberikan pelajaran dan tauladan yang baik. Nasehat yang baik adalah merupakan bentuk dari *hadhanah* yang berguna mendidiknya, sehingga seorang anak memiliki kepribadian yang khas yaitu kepribadian Islam (*Syakhsiyyah Islamiyyah*).

¹⁹ *Ibid*, h. 492.

²⁰ *Ibid*, h. 655.

2. Dasar Hukum As-Sunnah

Adapun dasar hukum as-Sunnah tentang hadhanah adalah :

كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدْنِهِ أَوْ يَنْصَرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ)
(

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra berkata, Sesungguhnya Rasulullah Saw bersabda: “setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanyalah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi” (HR. Bakhari)²¹.

Hadist ini mengisyaratkan kepada kita bahwa setiap anak yang dilahirkan dalam keadaan suci, tidak berdosa; bagaikan kertas putih tanpa noda yaitu dalam keadaan Islam. Baik buruknya seorang anak tergantung pada asuhan dari orang tuanya. Orang tualah yang menyebabkan seorang anak menjadi Yahudi, Nasrani dan Majusi.

Di samping itu, ketergantungan seorang anak terhadap kedua orang tua sangat besar. Karena binaan orang tua membawa dampak besar dalam kehidupannya. Rasulullah Saw mengisyaratkan tentang kewajiban dari orang tua terhadap anaknya sebagai amanah dari Allah SWT. Rasulullah Saw bersabda:

مُدُّوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ وَقَدَفُوا
بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ. ()

²¹ Al-Bukhari, *Sahih Bukhari*, (Beirut: Darul Fikri, tt), Juz II, h. 118.

Artinya: “Dari ‘Amar bin Syu’aib dari ayahnya dari neneknya berkata: Suruhlah anak-anakmu sholat ketika mereka berumur tujuh tahun, dan pukullah mereka karena mereka meninggalkan sholat pada umur sepuluh tahun dan pisahkanlah tempat tidur mereka” (HR. Abu Daud)²².

Hadits di atas menjelaskan tentang kewajiban orang tua untuk memerintahkan anak-anaknya untuk mengerjakan sholat sebagai simbol dari pengabdian kepada Allah SWT.

Dalam hadist lain Rasulullah Saw menjelaskan tentang siapa yang lebih berhak mengasuh anak. Rasulullah Saw bersabda:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه :
يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَ هَذَا كَانَ
بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَحَجْرِي لَهُ جَوَاءٌ, وَإِنَّ أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَدَأُ أَنْ يُنْزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : نَتَّحِقُّ بِهِ مَلَمٌ تَنْكِحِي (رواه ابوودودوصحيه
).

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar Ra berkata: sesungguhnya seorang wanita berkata : “Ya Rasulullah sesungguhnya anakku itu perutku yang mengandungnya, susu yang menjadi minumannya, pangkuanku yang menjadi pemeliharaannya, dan sesungguhnya ayahnya telah men-*thalaq* saya dan hendak mengambil anaknya dari pangkuanku”, lalu Rasulullah SAW bersabda: “kamu lebih berhak terhadapnya selama kamu belum menikah lagi” (HR. Abu Daud dan disahihkan oleh Tirmidzi)²³.

Hadits di atas menjadi dalil bahwa ibu lebih berhak terhadap asuhan atau pemeliharaan anaknya dari pada ayahnya, dengan catatan sang ibu belum menikah dengan laki-laki lain. Bila ibu telah menikah dengan laki-laki lain maka yang bertanggung jawab terhadap pemeliharaan anak itu adalah ayahnya.

²² Abu Bakar Muhammad, *Terjemahan Subulussalam*, (Surabaya: al-Ikhlâs, 1992), Juz I, h. 156.

²³ *Ibid*, h. 819.

Rasulullah Saw bersabda:

عن ابو هريرة رضى الله عنه, مِعْتُ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّدُجِي يُدِيدُ أَنْ يَذَّهَبَ بِابْنِي وَقَدْ سَقَانِي , فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَهَمَ عَلَيْهِ فَقَالَ دَوَّجُهَا: مَنْ يَحَاقِنِي فِي وَلَدِي فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِمَهَذَا أَبُوكَ وَهَذِهِ أُمُّكَ, فَخَذَّبِي أَيُّهُمَا شِئْتَ, فَأَخَذَبِي أُمَّهُ, مَا نَطَلَقْتُ بِهِ (رواه احدو صحه ترمذي)

Artinya: “Abu Hurairah Ra bercerita: Bahwa ada seorang wanita yang bertanya kepada Rasulullah SAW, “sesungguhnya bekas suamiku ingin mengambil anakku, padahal ia kubutuhkan untuk mengambil air dari telaga Inabah, tiba-tiba datang pula bekas suaminya itu, lalu Rasulullah berkata kepada anak itu: Hai anak, ini bapakmu dan ini ibumu, kamu boleh memilih yang mana yang kamu sukai, anak itu memegang tangan ibunya, lalu pergi bersama ibunya itu” (HR. Ahmad dan disahihkan oleh Tirmidzi)²⁴.

Nabi Saw bersabda yang berbunyi:

ع بن سنان رضى الله عنه انه اسلم وابت امر أته ان تسلم فاقعد النبي صلى الله عليه وسلم لام ناحية والا ب ناحية واقعدا لصبي بينهما فمال إلى امه فقال اللهم أدّه فمال إلى أبيه فأخذه. (اخرجه ابوداود والنساء وصحيه الحاكم)

Artinya: “Dari Rafi’ bin Sinan Ra bahwasanya ia telah masuk Islam, lalu Nabi memerintahkan agar ibunya duduk di satu sudut dan ayahnya di sudut lain, lalu Rasulullah mendudukkan di tengah-tengah, kemudian ia cenderung kepada ibunya, lalu Nabi berdo’a ”Ya Allah berilah ia petunjuk” kemudian ia cenderung kepada ayahnya dan langsung di bawa pergi oleh ayahnya” (HR. Abu Daud dan Nasa’i dan disahihkan oleh Hakim)²⁵.

Dari beberapa Hadits di atas, dapat dipahami bahwa *hadhanah* adalah hak si anak dan kewajiban orang tua yang harus dipenuhi. Bila si anak telah memiliki kemampuan untuk memilih mengikut ayah atau ibu, maka hak pemeliharaan diserahkan kepada anak tersebut.

²⁴ Ibid, h. 822.

²⁵ Ibid, h. 825.

3. Hadhanah Menurut Undang-Undang

Selain al-Qur'an dan As-Sunnah, di dalam Undang-Undang pun ada membahas tentang hadhanah, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pasal 45 yang berbunyi:

- (1) Kedua orang tua berkewajiban memelihara anak-anak mereka sebaik-baiknya.
- (2) Kewajiban orang tua yang disebut dalam pasal ini berlaku sampai anak kawin dan atau dapat berdiri sendiri, kewajiban yang mana berlaku meskipun perkawinan orang tua putus²⁶.

Kemudian ketika terjadi perceraian antara suami dan isteri, maka dalam pasal 41 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan:

- (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak-anak bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak di pengadilan memberikan keputusan.
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak-anak, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri²⁷.

C. HAK ISTRI TERHADAP ANAK SETELAH BERCERAI DENGAN SUAMI

Seorang pada permulaan hidupnya sampai pada umur tentu memerlukan orang lain untuk membantunya dalam kehidupan, seperti makanan, pakaian, membersihkan diri, di samping harus mempunyai waktu yang cukup untuk melakukan itu. Syarat tersebut hanya dimiliki oleh seorang wanita (ibu).

²⁶ Dirbenbapera Islam Depag RI, *Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, (Semarang: Aneka Ilmu, 1990), h. 18.

²⁷ *Ibid*, h. 17.

Oleh karena itu agama menetapkan bahwa wanita (ibu) adalah orang yang sesuai dengan syarat-syarat tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam hadist-Nya yang berbunyi:

عن عبدالله بن عمر رضي الله عنه : : يَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ ابْنَهُ هَذَا كَانَ بَطْنِي لَهُ وَعَاءٌ, وَحَجْرِي لَهُ حَوَاءٌ, أَبَاهُ طَلَّقَنِي وَأَرَدَانِي يَنْتَزِعَهُ مِنِّي فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنْتِ أَحَقُّ بِهِ مَلَمْ تَنْكِحِي (رواه ابودودوصحيه .)

Artinya: “Dari Abdullah bin Umar bahwa sanya seorang wanita berkata: Ya Rasulallah, bahwasanya anakku ini perutkulah yang mengandungnya, asuhankulah yang mengawasinya dan air susukulah yang minumnya. Bapaknya hendak mengambilnya dariku. Maka berkatalah Rasulallah: Engkau lebih berhak atasnya selama engkau belum menikah” (H.R. Ahmad, Abu Daud, Baihaki, Hakim)²⁸.

Setelah melengkapi syarat-syarat pengasuhan seperti dikemukakan, kesimpulan Ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak untuk selanjutnya melakukan *hadhanah*. Hal ini di dasari atas sabda Rasulallah Saw:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فَدَّقَ بَيِّنَاتِ الْوَلَدَةِ وَلَدَهَا فَدَقَّ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبَّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ()

Artinya: “Barang siapa yang memisahkan antara seorang ibu dan anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dengan yang dikasihinya di Hari Kemudian” (H.R. Abu Daud)²⁹.

Dari beberapa alasan di atas, apabila terjadi perceraian demi kepentingan anak, maka ibu lebih berhak melakukan *hadanah*, karena dengan

²⁸ Abd, Rahman Ghazali. *Ibit*, h. 178.

²⁹ Satria Efendi. *Op.cit*, h. 170.

adanya pertimbangan, bahwa ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya.

Menurut riwayat Imam Malik dalam kitab Muwattha' dari Yahya bin Said berkata Qasim bin Muhammad bahwa Umar bin Khattab mempunyai seorang anak, namanya Asyim bin Umar. Kemudian beliau bercerai, pada suatu waktu Umar ra pergi ke Quba' dan menemui anaknya itu sedang bermain-main di dalam masjid, Umar ra. mengambil anaknya dan meletakkannya di atas kuda.

Pada waktu itu datanglah nenek anak itu, dan Umar berkata “anakku” wanita itu juga berkata “anakku”. Maka di bawah perkara itu kepada khalifah Abu Bakar. Abu Bakar ra. memberikan keputusan bahwa anak Umar ra. ikut ibunya, dengan dasar yang dikemukakannya. Ibu lebih cenderung kepada anaknya, lebih halus, lebih pemurah, lebih penyantun, lebih baik dan lebih penyayang. Ia lebih berhak atas anaknya selama ia belum menikah dengan laki-laki lain³⁰.

Dengan demikian jelas, ketika terjadi perceraian antara suami istri, maka tanggung jawab memberi nafkah dan tempat tinggal terhadap anak serta istri tetap harus dilaksanakan oleh suami dan hak seorang istri yang telah diceraikan adalah mengasuh dan menyusui anaknya yang memerlukan susuan. Hal ini berdasarkan firman Allah SWT:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَأَمْرُهُمْ بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَمَشْرُوعٌ لَهُ وَآخَرُ ۝

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya” (TQS. Ath- Thalaq [65]: 6)³¹.

Ayat di atas menjelaskan bahwa istri yang di-*thalaq* hendaklah ditempatkan di tempat tinggal yang sesuai dengan kemampuan suami. Hal ini disebabkan tempat tinggal adalah sebagian dari nafkah yang wajib bagi. Suami hendaklah tidak memberikan kesulitan kepada sang istri dengan menempatkan orang yang tidak disukai tinggal bersama mereka.

Jika istri menyusui anak, sedangkan mereka dalam keadaan *thalaq ba'in* karena sudah habis masa iddahnya, maka mereka harus mendapatkan ganjaran yang sebanding. Di sini terdapat isyarat bahwa hak menyusui dan nafkah bagi anak-anak menjadi tanggung jawab suami. Sedangkan hak asuh anak-anak menjadi tanggung jawab istri³².

Bagi si anak, maka perawatannya, kesejahteraan serta kediaman bagi ibunya, tetap merupakan tanggung jawab sang ayah. Jika ibu tidak dapat

³¹ Departemen Agama, RI, *op.cit*, h. 257.

³² Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (Semarang: Toha Putera, 1967) Jilid. Ke-28, Cet.Ke-2, h. 246.

menyusui, atau timbul keadaan sedemikian rupa yang menghalangi ibu dari menyusui anaknya, maka menjadi tanggung jawab ayah untuk menyerahkan anaknya kepada orang lain agar dirawat atau disusui dengan biaya sendiri. Hal ini yang menyebabkan ayah mengurangi nafkah yang wajar. Dan nafkah tersebut berhak diperoleh seorang ibu sesuai dengan keadaannya³³.

Al Quran lebih lanjut menjelaskan masalah nafkah, firman Allah SWT:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ
يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma’ruf” (TQS. Al-Baqarah [2]: 233)³⁴.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kaum ibu baik yang masih berfungsi sebagai istri maupun dalam keadaan sudah *thalaq* berkewajiban untuk menyusui anak-anak mereka selama dua tahun penuh dan tidak lebih dari itu. Tetapi diperbolehkan kurang dari masa itu jika kedua orang tua memandang adanya kemaslahatan ketika masih dalam proses penyusuan³⁵.

Selanjutnya, seorang ayah berkewajiban menanggung kebutuhan istri berupa makanan dan pakaian, agar ia bisa melakukan kewajiban terhadap

³³ Abdurrahman, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992), Cet. Ke-1, h.123-124.

³⁴ Departemen Agama RI, *op.cit*, h. 57.

³⁵ Ahmad Musthafa al-Maraghi, *Ibit*, h. 318.

bayinya dengan sebaik-baiknya dan menjaganya dari serangan penyakit³⁶. Ayat ini dengan tegas memberi petunjuk tentang kewajiban dan tanggung jawab seorang ibu bahwa ia berkewajiban menyusui anaknya dan jika mereka disia-siakan, maka mereka akan memperoleh dosa dihadapan Allah karena telah melanggar perintah Syara'³⁷.

Ayat di atas menjelaskan bahwa kata “*riaq*” meliputi kecukupan pangan, pakaian yang memadai dan berbagai kebutuhan yang lainnya. Ayat tersebut secara khusus menyebutkan bahwa nafkah atas pemeliharaan anak, sehingga orang-orang egois tak mungkin menggunakan anak sebagai alasan untuk menekan pihak lain, baik ibu atau ayah. Seorang ayah berkewajiban terhadap perawatan, kesejahteraan serta tempat tinggal isteri dan anaknya. Selanjutnya ibu berkewajiban menyusukan anak-anaknya serta berkewajiban menyempurnakan penyusuan anaknya sampai dua tahun sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Syara'.

D. YANG BERHAK MELAKUKAN *HADHANAH*

a. Priode sebelum *mumayyiz*

Priode ini ketika anak baru lahir sampai menjelang umur tujuh atau delapan tahun. Pada masa ini pada galibnya seorang anak belum lagi *mumayyiz* atau belum bisa membedakan antara yang bermanfaat dan yang berbahaya bagi dirinya. Konkritnya ulama menunjukkan bahwa pihak ibu lebih berhak terhadap anak, untuk selanjutnya melakukan *hadhanah*, Rasulullah Saw bersabda:

عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من فَدَّقَ بَيِّنَاتِ الْوَلَدَةِ وَوَلَدَهَا فَدَقَّ اللَّهُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَحَبِّتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. ()

³⁶ *Ibit.*, h. 321.

³⁷ Hamka, *Tafsir al-Azhar*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983), juz 3-4, Cet. Ke-3, h. 233.

Artinya: “Barang siapa yang memisahkan seorang ibu dari anaknya, niscaya Allah akan memisahkannya dari orang yang dikasihinya di hari kemudian” (H.R. Abu Daud) ³⁸.

Di samping itu ibu lebih mengerti dengan kebutuhan anak dalam masa tersebut dan lebih bisa memperlihatkan kasih sayangnya. Demikian pula anak sangat membutuhkan kehadiran sang berada di dekatnya.

b. Priode Mumauiyyiz

Masa mumayyiz adalah dari umur 7 (tujuh) tahun sampai menjelang balig berakal. Pada masa ini seorang anak secara sederhana telah mampu membedakan antara yang baik dan buruk yang menimpa dirinya. Dan anak pada kondisi ini telah tumbuh akalnya secara sederhana.

Oleh karena itu, anak sudah mampu menjatuhkan pilihan mana yang terbaik untuk dilakukan. Maka pilihannya yang akan menentukan siapa yang berhak untuk mengasuhnya.

Di samping itu, Islam menetapkan susunan keluarga yang berhak mengasuh anak, yaitu:

1. Ibu anak tersebut
2. Nenek dari pihak ibu dan terus ke atas
3. Nenek dari pihak ayah
4. Saudara kandung perempuan anak tersebut
5. Saudara perempuan seibu

³⁸ Abd. Rahman Ghazali, *Pikih Munakahat*, (Jakarta: Pranada Media, th. 2003) Cet. 1, h. 179.

6. Saudara perempuan seayah
7. Anak perempuan dari saudara perempuan sekandung
8. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
9. Saudara perempuan seibu dan sekandung dengannya
10. Saudara perempuan ibu yang seibu dengannya (bibi)
11. Saudara perempuan ibu dan seayah dengannya (bibi)
12. Anak perempuan dari saudara perempuan seayah
13. Anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung
14. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
15. Anak perempuan dari saudara laki-laki seayah
16. Bibi yang sekandung dengan ayah
17. Bibi yang seibu dengan ayah
18. Bibi yang seayah dengan ayah
19. Bibinya ibu dari pihak ibunya
20. Bibinya ayah dari pihak ibunya
21. Bibinya ibu dari pihak ayahnya
22. Bibinya ayah dari pihak ayah (nomor 19 sampai dengan 22, dengan mengutamakan yang sekandung dengan masing-masingnya).

Jika anak tidak mempunyai kerabat perempuan dari kalangan *mahram* seperti yang telah ditetapkan di atas, atau *mahram*-nya ada tetapi tidak dapat mengasuhnya, maka pengasuhan anak itu beralih kepada kerabat laki-laki yang masih mahramnya, atau memilih hubungan darah dengannya, sesuai dengan urutan masing-masing dalam persoalan waris. Pengasuhan anak itu beralih kepada:

23. Ayah kandung anak itu
24. Kakek dari pihak ayah dan terus ke atas

25. Saudara laki-laki sekandung
26. Saudara laki-laki seayah
27. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung
28. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
29. Paman yang sekandung dengan ayah
30. Paman yang seayah dengan ayah
31. Pamannya ayah yang sekandung
32. Pamannya ayah yang seayah dengan ayah

Jika tidak ada seorang pun kerabat dari *mahram* laki-laki, atau ada tetapi tidak bisa mengasuh anak, maka hak pengasuhan anak itu beralih kepada mahram-mahramnya yang laki-laki selain kerabat dekat, yaitu:

33. Ayah ibu
34. Saudara laki-laki ibu
35. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seibu
36. Paman yang seibu dengan ayah
37. Paman yang sekandung dengan ayah
38. Paman yang seayah dengan ayah
39. Paman yang seayah dengan ibu³⁹.

Dari keterangan di atas jelas sekali bahwa ibu yang menjadi hak asuh utama ketika terjadi perceraian, baik perceraian karena alami maupun tidak.

³⁹ Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2005), Cet. Ke-5, h. 394-395.

Ketika ibu tidak ada hak asuh pindah kepada keluarga dari pihak ibu dan selanjutnya dari pihak ayah, jika urutan dari keluarga pihak ibu yang berhak tidak ada. Sementara berdasarkan ketentuan syara' ayah menempati urutan ke-23 dari keluarga yang berhak (*shohibul haq*).

E. KEWAJIBAN AYAH TERHADAP ANAK SETELAH TERJADI PERCERAIAN

Setelah terjadi perceraian antara suami dan isteri, Islam menetapkan bahwa ayah berkewajiban dalam memenuhi nafkah. Hanya saja jika anaknya laki-laki, maka ayah berkewajiban menafkahnya hingga anak baligh atau mampu menghidupi dirinya sendiri; kalau anak yang ditinggalkan seorang perempuan, maka sang ayah berkewajiban menafkahnya hingga ia berumah tangga. Hal ini berdasarkan dalil syara' yang menjelaskan salah satu kewajiban dari sang ayah bagi anak adalah memenuhi nafkahnya.

BAB IV
HAK SUAMI ATAS HADHANAH SETELAH PERCERAIAN
DITINJAU MENURUT HUKUM ISLAM
(STUDI ADAT MARGA HARAHAH KECAMATAN RUMBAI PESISIR
KOTA PEKANBARU)

A. HAK SUAMI TERHADAP HADHANAH SETELAH PERCERAIAN
DALAM MARGA HARAHAH

Marga Harahap adalah salah satu marga yang ditemukan dalam masyarakat dengan suku bangsa batak. Secara historis marga ini berasal dari daerah Sumatera Utara yang merantau keluar daerahnya, di antaranya ditemukan di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru. Meskipun tidak berdomisili di kampung asalnya, namun masyarakat yang bermarga harahap masih tetap meyakini dan senantiasa selalu melestarikan tradisi dan budaya yang telah diwarisi oleh generasi sebelum mereka (leluhur). Hal ini merupakan salah satu ciri khas dan merupakan jati diri dari suatu bangsa, misalnya ketentuan adat dan tradisi tentang hak asuh anak (*hadhanah*) setelah perceraian¹.

Hasil wawancara penulis dengan tokoh adat marga harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir, dimana ketika perceraian terjadi antara suami dan isteri, maka hak asuh anak menjadi hak suami, bukan isteri. ada beberapa faktor penyebab, hak asuh anak dibebankan kepada suami bukan isteri, adalah sebagai berikut:

¹ Hajaruddin Harahap, (Tokoh Masyarakat: Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 13 Mei 2007..

a. Garis Keturunan

Garis keturunan merupakan faktor utama yang mendasari laki-laki (suami) dalam marga harahap lebih berhak dalam mengasuh anaknya dari pada perempuan (ibu). Hal ini juga dilatarbelakangi oleh sistem keturunan yang digunakan dalam masyarakat batak (secara umum), marga harahap (di antaranya); yaitu bersifat patrilineal. Sistem patrilineal adalah sistem garis keturunan yang mengambil dari pihak ayah (laki-laki).

Pada dasarnya faktor keturunan ini tidak hanya diadopsi oleh masyarakat dalam marga harahap saja, akan tetapi juga berlaku dan digunakan oleh setiap masyarakat bersuku bangsa batak².

b. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi juga merupakan salah satu faktor yang mendorong pihak laki-laki lebih berhak dalam mengasuh anak setelah terjadi perceraian, jika dibandingkan dengan perempuan (sang ibu). Dimana perempuan (ibu) adalah makhluk yang lemah dan memiliki keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan yang atas anak-anaknya. Sehingga sang ibu (perempuan tersebut) akan menghadapi masalah yang baru; meskipun di sisi lain perempuan adanya perempuan tersebut memiliki pekerjaan dan mampu memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya, maka ia akan memiliki peran ganda dalam keluarga, dimana disatu sisi ia harus berperan sebagai ayah bagi anak-anaknya yaitu mencari nafkah dalam memenuhi kebutuhan anak-anaknya, sementara disisi lain ia juga peran sebagai ibu (peran yang sesungguhnya) yaitu mendidik dan membina anak-anaknya menjadi orang-orang yang berguna di masa-masa mendatang³.

² Hasan Wirayudha Harahap (Masyarakat: Kecamatan Rumbi Pesisir Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 13 Mei 2007.

³ Hasan Wirayudha Harahap (Masyarakat: Kecamatan Rumbi Pesisir Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 13 Mei 2007.

Di samping itu, jika dicermati peran ganda yang dimainkan oleh sang isteri setelah perceraian sudah keluar dari fungsi utama seorang perempuan dalam rumah tangga, yaitu sebagai *ummu wa robbatu al-bayt* (ibu dalam rumah tangga)⁴.

Menurut Imam An-Nabhany berpendapat bahwa wanita tidak berkewajiban dalam bekerja (memenuhi kebutuhan keluarga), akan tetapi seorang perempuan diperbolehkan bekerja dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Bekerja dengan kemauan dirinya sendiri, tanpa ada paksaan atau tekanan dari suaminya. Karena kewajiban memenuhi kebutuhan keluarga (bekerja) dibebankan atas laki-laki (suami).
2. Ketika sang isteri (perempuan) bekerja dengan kemauannya sendiri, maka ia telah berbuat ma'ruf (kebaikan) kepada keluarganya. Oleh karena itu perbuatannya dikategorikan sebagai sedekah atas suami dan anak-anaknya⁵.

c. Faktor keamanan

Faktor ketiga juga merupakan salah satu faktor yang melatarbelakangi ayah (laki-laki) lebih berhak dalam mengurus urusan anak-anaknya setelah perceraian, dibandingkan dengan perempuan (ibu). Hal ini berhubungan dengan keselamatan dari anak-anak mereka setelah perceraian. Jika dilihat antara laki-laki dan perempuan, tentunya laki-laki (ayah) lebih memungkinkan dalam memberikan perlindungan atas anak-anaknya, dibandingkan ibu (perempuan)⁶.

⁴ Abdul Thoha Harahap (Tokoh Masyarakat: Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 12 Mei 2007.

⁵ An-Nabhany, *Nizham al-Ijtima'i fi al-Islam*, diterjemahkan oleh M. Nasir dkk, *Sistem Pergaulan Dalam Islam*, (Jakarta: Hizbut-tahrir Indonesia, 2009), Edisi Mu'tamadah, h. 130.

⁶ Abdul Thoha Harahap (Tokoh Masyarakat: Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 12 Mei 2007.

Di samping beberapa faktor di atas yang melatarbelakangi pihak ayah (laki-laki) lebih berhak dari ibu, dimana ketika dihadapkan di masa mendatang ibu menikah lagi; Dalam hal ini yang lebih berhak menentukan sesuatu adalah sang suami, bukan dirinya. Maka sang ibu akan mengalami persoalan yang rumit. Dimana suatu tindakan preventif (pencegahan) yang dihindari, dan dikhawatirkan suami keduanya kurang menerima kehadiran anak-anaknya⁷.

Menurut Qohar Harahap (Tokoh Adat Marga Harahap), beberapa faktor di atas semata-mata bertujuan memberikan kemudahan atau tidak memberatkan pihak perempuan⁸. Oleh karena itu, hak mengasuh anak dibebankan kepada ayah (laki-laki) dan bukan ibu (perempuan). Di sisi lain, sang ibu (perempuan) akan tetap mendapatkan haknya atas anak-anaknya setelah terjadinya perceraian, dimana ia akan diberikan kesempatan untuk bertemu dengan anak-anaknya, dengan ketentuan pertemuan tersebut atas persetujuan dan sepengetahuan mantan suaminya (pihak laki-laki) atau ahli waris dari pihak suami. Ketika sang ibu bertemu dengan anak-anaknya dilakukan tanpa sepengetahuan mantan suami atau ahli waris pihak mantan suami, maka ibu (perempuan tersebut) akan dikenakan sanksi yang telah ditetapkan dan mengikat bagi masyarakat bermarga harahap⁹.

⁷ Syaifullah Harahap (tokoh masyarakat: Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 17 Mei 2007.

⁸ Qohar Harahap (Kepala Adat: Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2007.

⁹ Qohar Harahap (Kepala Adat: Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2007.

Adapun bentuk sanksi yang ditetapkan bagi mantan isteri yang menemui anak-anaknya tanpa sepengetahuan mantan suami adalah sebagai berikut:

1. Sanksi berat (keras); ketentuan dalam sanksi bersifat berat (keras), dimana sang ibu (mantan isteri) tidak diperkenankan sama sekali untuk bertemu dengan anak-anaknya di masa mendatang.
2. Sanksi sedang; ketentuan dalam sanksi sedang, dimana sang ibu diperkenankan untuk bertemu dengan anaknya setelah membayar tebusan berupa membayar seekor kerbau atau uang senilai seharga seekor kerbau.
3. Sanksi ringan; ketentuan dalam sanksi ini dimana sang ibu diperbolehkan bertemu dengan anak-anaknya setelah kurun waktu 3 bulan mendatang. Biasanya ketentuan sanksi yang ketiga tergantung negosiasi atau perundingan antara mantan isteri dan mantan suami. Meskipun sudah ditetapkan dalam adat perempuan tersebut diperbolehkan menemui anak-anaknya setelah melewati kurun waktu 3 bulan, namun ketika mantan suami memaafkan tindakan yang telah dilakukan oleh mantan isteri, maka mantan isteri akan mendapat dispensasi dari pihak suami, dimana ia diperbolehkan menemui anaknya. Akan tetapi, kurun waktu yang diperbolehkan bagi mantan isteri untuk menemui anaknya merupakan hak mutlak dari mantan suami tersebut¹⁰.

¹⁰ Qohar Harahap (Kepala Adat: Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2007.

Berdasarkan penjelasan dan ketentuan sebelumnya, dimana hak asuh anak merupakan hak mutlak yang dimiliki oleh laki-laki (mantan suami), disamping mantan isteri tetap diperolehkkan bertemu dengan anak-anaknya setelah memperoleh persetujuan dari mantan suami. Hal ini tetap berlaku ketika perceraian antara suami isteri dilatarbelakangi karena faktor kematian, atau setelah terjadi perceraian mantan suami meninggal dunia. Ketika kondisi ini ditemukan, maka hak hadhanah tetap menjadi hak dari suami yaitu berpindah kepada ahli waris mantan suami yang masih hidup¹¹.

Adapun ketentuan berpindahnya hak hadhanah kepada ahli waris dari pihak laki-laki (mantan suami) adalah sebagai berikut:

1. Kakek atau nenek dari pihak ayah
2. Saudara laki-laki kandung dari pihak ayah secara berurutan dari yang paling tua hingga termuda kecil (adek)
3. Saudara perempuan kandung dari pihak ayah secara berurutan dimulai dari yang paling tua (kakak) hingga yang termuda (adek)¹².

Di samping itu, ketentuan susunan ahli waris yang berhak atas hak hadhanah setelah perceraian ketika ayah meninggal dunia (cerai mati), harus memenuhi persyaratan di bawah ini:

1. Ahli waris akan memiliki hak dalam hadhanah ketika sudah atau akan berumah tangga.

¹¹ Syaifullah Harahap (tokoh masyarakat: Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 17 Mei 2007.

¹² Ernita Boru Harahap, (Masyarakat: Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 13 Mei 2007.

2. Ahli waris akan memiliki hak dalam hadhanah ketika memiliki ilmu yang memadai.
3. Ahli waris akan memiliki hak dalam hadhanah ketika memiliki kemampuan ekonomi menengah ke atas¹³.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Qohar Harahap, diaman persyaratan-persyaratan tersebut di atas bersifat mengikat bagi setiap ahli waris yang mengambil alih atas hak hadhanah tersebut. Ketika persyaratan di atas belum atau tidak terpenuhi, maka hak asuh tersebut berpindah kepada mantan isteri yang ditinggalkan. Akan tetapi, ketika di masa mendatang ahli waris yang ditinggalkan memenuhi beberapa persyaratan di atas, maka hak hadhanah yang dimiliki oleh mantan isteri bisa dipindahkan kepada ahli waris tersebut, setelah memenuhi keputusan rapat dari tokoh-tokoh adat dalam marga harahap¹⁴. Kondisi demikian diakui dan ditegaskan oleh Siti Boru Harahap¹⁵.

B. ANALISIS HUKUM ISLAM

Islam adalah agama yang hak, dimana mengatur segala aspek kehidupan. Hal ini relevan dengan apa yang dikemukakan oleh Taqiyuddin An-Nabhany dalam kitabnya sistem peraturan dalam Islam (dalam bahasa aslinya *Nizhom al-Islam*). Beliau mendefenisikan bahwa Islam adalah agama yang diturunkan oleh Allah Swt kepada Saidina Muhammad Saw yang

¹³ Abdul Thoha Harahap (Tokoh Masyarakat: Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 12 Mei 2007.

¹⁴ Qohar Harahap (Kepala Adat: Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 15 Mei 2007.

¹⁵ Siti Boru Harahap (warga masyarakat Harahap: Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru), *Wawancara*, tanggal 13 Mei 2007.

mengatur hubungan manusia dengan Khaliknya (masalah aqidah dan ibadah), dengan dirinya sendiri (masalah makan dan minum, berpakaian dan akhlak), mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (masalah mu'amalah dan uqubat/sanksi-sanksi)¹⁶.

Defenisi di atas mengandung makna yang tentunya tidak sulit untuk difahami. Yang mana Islam adalah sebuah agama sekaligus ideologi, yang memiliki aturan bagi setiap pengikutnya. Karena Islam adalah *way of life*.

Oleh karena itu, secara tegas bahwa permasalahan yang dihadapi yang bebas nilai (*value free*), karena pada dasarnya hukum asal perbuatan manusia selalu terikat dengan hukum syara'. Sesuai dengan kaidah syara' yang berbunyi:

Artinya: "Asal perbuatan manusia terikat kepada hukum syara'¹⁷." (kaidah syara').

Dari kaidah syara' di atas, jelas bahwa standar perbuatan manusia selalu terikat dengan hukum syara'. Spesifiknya adalah hukum taklifi, yaitu wajib, sunnah, mubah, makruh dan haram.

Adapun permasalahan permasalahan *hadhanah* (hak asuh anak), para ulama sangat jelas membahas dalam karya-karyanya. Dari karya yang telah mereka lahirkan dapat dijadikan sebagai rujukan dan dasar dalam mengkaji lebih lanjut permasalahan mengenai hak hadhanah; misalkan hak hadhanah

¹⁶ Taqiyuddin An-Nabhany, *Nizhomu al-Islam*, (Bogor: Thoriqul Izzah, 2005), cet. Ke-5, h. 84.

¹⁷ Abdul Hamid Hakim, *Mabadi' Awwaliyyah*, (Jakarta: maktabah sa'diyah putra, t.th), h. 29.

yang berkembang pada suku batak bermarga harahap. Dimana dalam ketentuan adat marga harahap hak hadhanah setelah terjadi perceraian perceraian, maka hadhanah menjadi hak ayah atau ahli waris dari pihak ayah.

Berdasarkan dalil-dalil syara' dalam bab 3, maka hak hadhanah merupakan hak yang dimiliki oleh mantan isteri (ibu). Ketentuan hak hadhanah yang berkembang dalam adat atau tradisi marga harahap adalah ketentuan yang dapat dikategorikan kepada ketentuan bathil. Karena ketentuan tersebut sudah bertentangan dengan ketentuan yang terdapat Islam. Dimana ketentuan yang telah menetapkan bahwa ayah dan ahli waris dari ayah ditinggalkan (ayah meninggal dunia) yang lebih berhak atas hak hadhanah atas anak-anaknya. Di sisi lain, setelah dipahami maka terlihat lebih berhak ahli waris dari pihak ayah dari pada seorang ibu (wanita) yang telah bersusah payah melahirkan anak-anaknya.

Di dalam syari'at Islam ditetapkan bahwa ayah memperoleh hak hadhanah atas anak-anaknya setelah 22 urutan yang telah ditetapkan tidak ada; ayah menempati urutan ke 23.

Di sisi lain, ditemukan bahwa seorang ibu yang ingin menemui anaknya harus memperoleh izin dari mantan suami. Dimana dapat dipahami ketika mantan suami tidak mengizinkan, maka keinginan tersebut tidak dapat diwujudkan. Akan tetapi, ketika mantan isteri tetap bersikeras dan berusaha untuk menemui anak-anaknya dengan cara sembunyi atau tanpa sepengetahuan mantan suami, maka mantan isteri akan dikenakan sanksi-sanksi sesuai tindakan yang dilakukannya.

Ketentuan hukum Islam sudah sangat jelas, ketika perceraian terjadi (thalaq), maka terputuslah ikatan suci yang halal dan diberkahi, sementara ikatan atau hubungan antara ayah dengan anak atau ibu dengan anak tidak akan pernah putus. Oleh karena itu, syari'at Islam menerangkan bahwa:

1. Melarang terjadinya perceraian (thalaq), kecuali dipisahkan oleh ajal yang telah ditetapkan. Meskipun perbuatan perceraian (thalaq) merupakan sesuatu yang halal dan dibolehkan, akan tetapi perceraian adalah sesuatu yang sangat dibenci oleh Allah SWT.
2. Adanya kerjasama antara suami dan isteri; dimana suami berkewajiban mencari dan memberi nafkah untuk keluarga serta memberi upah kepada isteri yang telah mengasuh dan menyusui anak-anaknya, sementara isteri sebagai *ummu wa rabbatu al-bayt* (ibu dari rumah tangga). Keduanya berkewajiban membesarkan, mendidik dan lain sebagainya; Karena anak merupakan amanat yang telah dititipkan oleh Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT:

❖ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوهُمَا فَإِنْ سَأَلْتُمْ مِمَّا عَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَأَنْتَقُوا لِلَّهِ وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (TQS. al-Baqarah [2]: 233)¹⁸.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ ﴿٨﴾

Artinya: “Dan orang-orang yang memelihara amanat-amanat¹⁹ (yang dipikulnya) dan janjinya” (TQS. al-Mukminun [23]: 8)²⁰.

3. Perintah khawatir ketika meninggalkan keturunannya dalam keadaan lemah, sebagaimana firman Allah SWT:

وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرْكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

Artinya: “Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang benar” (TQS. an-Nisaa' [4] : 9)²¹.

¹⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, (Jakarta: Syamil Cipta Media, 2005), h. 57.

¹⁹ Amanat-amanat Allah SWT banyak sekali, di antaranya anak. Oleh karena itu berkewajiban mendidikan dan mengarahkannya sesuai dengan ketentuan syari'at Allah SWT (Islam).

²⁰ *Ibid*, h. 342.

²¹ *Ibid*, h. 78.

Berdasarkan dalil-dalil al-Qur'an di atas, selanjutnya berpedoman kepada konsep teoritis tentang konsep hadhanah dalam Islam, maka seorang ibu lebih berhak dari pada ayah dalam masalah hak hadhanah (hak asuh anak) setelah terjadi perceraian. Hal ini bila anak dihasilkan dari perkawinan pasangan suami isteri belum baligh, karena anak yang belum baligh belum bisa menentukan dan membuat keputusan siapa yang mereka pilih (ayah atau ibu). Di samping itu, dari segi psikologi yang dimiliki oleh seorang ayah dan ibu dalam kondisi anak yang belum baligh, maka seorang ibu lebih memahami sesuatu yang diinginkan dan dibutuhkan oleh anak-anaknya, bila dibandingkan dengan seorang ayah.

Akan tetapi, bila anak yang dihasilkan dari perkawinan mereka sudah berada pada fase baligh dan dapat menentukan dan membuat keputusan, maka dipilih seorang anak (baik ayah maupun) akan menjadi status hukum dalam menetapkan siapa yang lebih berhak atas hak hadhanah tersebut.

Dari keterangan di atas, maka hak suami atas hadhanah setelah perceraian dalam Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam ketentuan adat setelah perceraian, hadhanah secara mutlak menjadi hak suami, dan bukan isteri, baik kondisi anak yang dihasilkan dari perkawinannya baligh atau belum baligh.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Setelah dilakukan pemaparan dari data-data yang diperoleh dalam penelitian ini tentang Hak Suami atas Hadhanah Setelah Terjadi Perceraian Dalam Marga Harahap Menurut Hukum Islam, dan selanjutnya dilakukan analisis hukum Islam dari rumusan masalah dalam penelitian ini, sehingga penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam ketentuan adat Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, dimana bila perceraian terjadi antara pasangan suami isteri dan menghasilkan anak dari hubungan atau ikatan perkawinan tersebut, maka hak hadhanah (hak asuh anak) menjadi hak suami, baik anak tersebut sudah baligh atau belum baligh. Sementara seorang isteri dalam ketentuan adat Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru tidak memiliki hak hadhanah (hak asuh anak) sama sekali setelah perceraian. Dan ia akan dikenakan sanksi, bila bertemu dengan anaknya tanpa memperoleh izin dari mantan suaminya.
2. Dalam tinjauan hukum Islam terhadap hak suami atas hadhanah setelah perceraian di Kecamatan Rumbai Pesisir bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam ketentuan dan ketetapan adat Marga Harahap di Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, suami yang memiliki hak mutlak atas anak dan isteri tidak memiliki hak sama sekali. Sementara, menurut hukum Islam, bila anak belum baligh, maka hak hadhanah

merupakan hak isteri, karena anak belum bisa memilih siapa yang akan mengasuh mereka. Selanjutnya dari sisi psikologis, seorang ibu lebih memahami anaknya, bila dibandingkan dengan seorang ayah. Di sisi lain, bila anak sudah baligh, maka hak hadhanah berdasarkan keputusan atau ketetapan siapa yang dipilih oleh anak, artinya siapa yang diputuskan untuk mengasuh mereka, apakah ayah atau ibu.

B. SARAN-SARAN

Setelah diperoleh kesimpulan dari penelitian yang dilaksanakan, selanjutnya penulis merekomendasikan saran-saran dalam penelitian, yaitu:

1. Kepada masyarakat; diharapkan penelitian ini dapat menjadi sarana informasi yang bermanfaat bagi masyarakat marga harahap, dimana untuk senantiasa selalu terikat kepada aturan syara' dan adat istiadat yang diikuti adalah selama adat tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan di dalam syari'at Islam, misalkan masalah ketentuan adat tentang hadhanah.
2. Kepada Tokoh Masyarakat, Agama dan Adat dalam Marga Harahap; diharapkan penelitian ini dapat menjadi salah satu dasar dan rujukan untuk mengadakan revolusi terhadap sistem aturan yang ada, misalnya ketentuan hak hadhanah dalam marga harahap. Idealnya, senantiasa selalu menjadikan syari'at Islam sebagai standar dan dasar dalam menentukan dan menetapkan sesuatu keputusan dan hukum. Karena syari'at Islam merupakan sistem dan aturan yang haq dan lengkap yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunah Rasulullah SAW. Selanjutnya, adat istiadat yang ada juga harus berpedoman dan sejalan dengan ketentuan hukum Islam itu sendiri, *insya Allaah******

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, Perkawinan Dalam Syari'at Islam, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992).
- Al-Bajuri Al-Ghazi, Ibnu Qayyim, t.th, Terjemahan Al-Bajuri, Indonesia: Maktabah Dahlan
- Al-Bukhari, Sahih Bukhari, (Beirut: Darul Fikri, t.th)
- Al-Jaziri, Abu Bakar Jabir, Minhajul Muslimin, (Bairut: Darul Fikri, t.th)
- al-Maraghi, Ahmad Musthafa, Tafsir al-Maraghi, (Semarang: Toha Putera, 1967)
- An-Nabhany, Taqiyuddin, Sistem Pergaulan Hidup Dalam Islam, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2001)
- _____, Nizhomu al-Islam, (Bogor: Thoriqul Izzah, 2005)
- Anwar, Dessy, Kamus Bahasa Indonesia, (Surabaya: KaryaAbditama, 2001)
- Ayyub, Syaikh Hasan, Fiqih Keluarga, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005)
- Dahlan, Abdul Azis, Ensiklopedi Hukum Islam, (Jakarta : Ictiar Van Hoeve, 1997)
- Drajat, Zakiah, Ilmu Fiqih, (Yogyakarta: Dana Bakti Wakaf, 1995)
- Effendi, Satria, Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer, (Jakarta: Pernada Media, 2004)
- Ghazali, Abd. Rahman, Fikih Munakahat, (Jakarta: Pranada Media, 2003)
- _____, Fqih Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006)

Hakim, Abdul Hamid, mabadi' awwaliyyah, (Jakarta: maktabah sa'diyah putra, t.th)

Hamka, Tafsir Al-Azhar, (Surabaya: Yayasan Latimojong, 1981)

_____, Tafsir al-Azhar, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1983)

Marbawi, M. Idris, Kamus Al-Marbawi, (Semarang: Usaha Keluarga, t.th)

Muhammad, Abu Bakar, terjemahan Subulussalam, (Surabaya: Al-Iklas, 1992)

Nur, Djaman, Fikih Munakahat, (Semarang: Bina Utama, 1993)
RI, Departemen Agama, al-Quran dan Terjemahan, (Bandung: Gema Risalah, 1993)

_____, Kompilasi Hukum Islam, (Jakarta: tp, 1997)

Sabiq, Sayyid, Fikih Al-Sunnah, Alih Bahasa Moh Thalib, (Bandung: Al-Ma'arif, 1980)

_____, Fiqih Al-Sunnah, (Bairut: Darul Fikri, t.th)

Suma, Muhammad Amin, Hukum Keluarga di Dunia Islam, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2004)

Susanto, Budi, Tafsir Kebudayaan, (Yogyakarta: Kanisius, 1992)

Yunus, Mahmud, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Hidakarya Agung, 1989)

DAFTAR TABEL

Tabel II.1 Penduduk Menurut Usia	11
Tabel II.2 Penduduk Menurut Jenis Kelamin	12
Tabel II.3 Penduduk Menurut Mata Pencaharian	13
Tabel II.4 Penduduk Menurut Agama	14
Tabel II.5 Sarana Ibadah	15
Tabel II.6 Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan	16
Tabel II.7 Sarana Pendidikan	17